

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang termasuk anak berkebutuhan khusus, hal ini dapat pula diartikan sebagai upaya meningkatkan kesempatan dan pemerataan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dan berkualitas. Perubahan paradigma ini secara keseluruhan merupakan proses peningkatan mutu pendidikan. Implikasi penting dari perubahan paradigma tersebut adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya keragaman dan perbedaan kebutuhan individu.

Pendidikan inklusif membawa perubahan yang mendasar yaitu adanya pergeseran pemikiran dari pemikiran *special education* (pendidikan khusus) bergeser ke *special needs education* (pendidikan kebutuhan khusus). Perubahan tersebut bermakna strategis dan berdampak luas terhadap praktek layanan pendidikan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Dengan demikian implementasi pendidikan inklusif berarti memandang anak sebagai individu yang memiliki keragaman, keunikan, kemampuan, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda sehingga proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan

untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam bentuk kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Dalam tataran pendidikan inklusif, Johnsen (2003:23) menyatakan, “Prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidikan khusus”. Hal ini dimaksudkan menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Perubahan lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi secara klasikal kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap siswa sesuai kebutuhannya dalam setting kelas yang sama. Pendidikan inklusif berarti memandang eksistensi anak agar tumbuh kembang secara alami dan optimal sesuai dengan potensi masing-masing.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa mengemukakan dalam kutipan berikut.

“Prevalensi jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sekitar 3% dari populasi anak usia sekolah, angka tersebut belum termasuk mereka yang tergolong autis, hiperaktif, berbakat dan berkesulitan belajar, baru sekitar 3,7% (33,850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum maupun sekolah luar biasa (sekolah khusus). Kenyataan ini menandakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus (96,3%) belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh (1) kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang, (2) jarak antara rumah dan SLB cukup jauh, dan (3) sekolah umum (SD, SMP) tidak mau

menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, oleh karena itu perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum”.

Kutipan di atas menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah berkebutuhan khusus di Indonesia berjumlah (96,3%) belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan dan baru sekitar 3,7% (33,850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum maupun sekolah luar biasa (sekolah khusus). Hal ini disebabkan oleh ekonomi orang tua, terbatasnya SLB, dan sekolah umum yang belum menerapkan program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian pendidikan harus dipandang sebagai upaya memberdayakan individu yang memiliki keragaman dimana semua anak terlepas dari kemampuan dan ketidak mampuan mereka, latar belakang sosial ekonomi, suku, budaya dan bahasa, agama atau jender seyogyanya dapat menyatu dalam komunitas sekolah yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus memperoleh akses ke sekolah adalah dengan menjadikan sekolah umum menjadi sekolah inklusif, yaitu sekolah yang mengizinkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat belajar dikelas bersama dengan siswa lain yang tidak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang lain untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut.

Implementasi pendidikan inklusif dalam tataran pembelajaran dan pengajaran di kelas akan bermakna bila guru mampu mengembangkan proses

pembelajaran dan pengajaran sesuai dengan perbedaan kebutuhan individu serta mampu mengembangkan program pembelajaran individual bagi siswa berkebutuhan khusus. Secara empirik pemikiran tersebut akan sangat memerlukan keterampilan profesional dalam proses dan pelaksanaannya.

Untuk mendukung upaya pemerintah maka perlu dilakukan peningkatan kualitas model layanan pendidikan sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. “Mutu pendidikan secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran” (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2009:1). Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru yang sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Khusus dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusif, diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut Arum (2004:122) mengemukakan bahwa guru sekolah reguler pada umumnya tidak belajar PLB, dan sekolah reguler juga tidak dipersiapkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus, kurikulum yang digunakan di sekolah reguler tidak sepenuhnya sesuai untuk anak berkebutuhan khusus, dan guru reguler tidak dilatih untuk mengembangkan kurikulum yang berdeferensiasi dalam bentuk program-program

pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan individu setiap siswa tanpa kecuali bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut dibuktikan pula oleh penelitian yang dilakukan Dyah (2005) dalam penelitiannya mengenai pengkajian pendidikan inklusif di Indonesia ditemukan bahwa “tidak adanya pedoman pembelajaran bagi guru-guru di sekolah dan menyebabkan guru inklusi menggantungkan diri pada guru pendidikan luar biasa (PLB) yang tidak selalu dimiliki oleh setiap sekolah”. Hal ini membuat guru-guru di sekolah tersebut yang pembelajarannya hanya di dasarkan nalurnya saja yang menyebabkan layanan pendidikan disekolah inklusif menjadi tidak optimal.

Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah menengah pertama khususnya dalam tataran proses belajar mengajar akan berdampak pada perubahan penyelenggaraan pembelajaran serta pengelolaan kelas, dimana selain dihadapkan pada kelas klaksikal guru juga diberi tanggung jawab baru untuk melayani siswa dengan kebutuhan yang berbeda.

Disadari bahwa penyelenggaraan pembelajaran mengandung serangkaian interaksi timbal balik dalam situasi edukatif antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa yang nantinya menghasilkan iklim pembelajaran yang kondusif, efektif, kreatif, produktif dan menyenangkan. Selain itu akan terbina hubungan interpersonal yang sehat dan mendorong munculnya perubahan perilaku belajar siswa. Untuk mencapai iklim kelas tersebut maka diperlukan pengetahuan yang baik oleh guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif serta memahami kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.

Bukti kepedulian Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan terhadap pendidikan inklusif adalah dengan menetapkan sebanyak 8 Sekolah Menengah Pertama khususnya di kota Ambon sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, berdasarkan SK No 420/537/2010 tgl 28 Juli 2010. Atas dasar tersebut maka sekolah-sekolah yang ditunjuk mulai menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif, meskipun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kekurangan, bahkan belum bisa dikatakan inklusif karena belum bisa menjalankan program layanan pembelajaran inklusif di sekolahnya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya tenaga Guru Pendidikan Khusus (GPK), selain itu perencanaan dan implementasi pembelajarannya masih cenderung sama antara anak-anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah tidak semua guru reguler memiliki pengetahuan yang baik mengenai pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 12 orang guru dan kepala sekolah diketahui bahwa indikasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ambon belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Anak-anak di sekolah pada umumnya belum bisa menerima atas kehadiran anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler, dan di pandang mereka hanya menghambat proses pembelajaran.
2. Sistem penerimaan siswa baru yang belum merata sehingga siswa dengan kondisi tertentu tidak dapat di terima di sekolah tersebut.

3. Masih rendahnya pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif dan ABK dimana guru beranggapan bahwa pendidikan inklusif adalah sekedar menerima ABK di sekolah reguler.
4. Pelaksanaan pembelajaran masih secara klasikal belum mengakomodasi kebutuhan ABK.
5. Guru belum bisa membuat program pembelajaran individual
6. Masih terdapat keterbatasan kesiapan sumber daya dalam hal ini belum adanya Guru Pendamping Khusus pada sekolah penyelenggara inklusif.

Selain hal tersebut di atas, sejauh ini belum pernah dilakukan evaluasi keterlaksanaan implementasi pendidikan inklusif pada Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon berdasarkan index inklusi yang meliputi budaya, kebijakan dan praktek.

Index inklusi merupakan sebuah sumber daya yang mendukung perkembangan pendidikan inklusif. Index inklusi adalah sebuah dokumen yang komprehensif dan lengkap, yang dapat membantu setiap orang untuk menentukan langkah berikutnya dalam mengembangkan *setting* pendidikan inklusif secara mandiri Booth and Ainscow, (2002:3). Untuk mengetahui keterlaksanaan implementasi pendidikan inklusif Sunanto (2009:4) mengemukakan bahwa “keterlaksanaan pendidikan inklusif dapat di evaluasi menggunakan suatu index yang disebut *index for inclusion*”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis merasa perlu mengungkap tentang “Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon”. Masalah ini dianggap penting untuk diteliti guna mengetahui

keterlaksanaan implementasi pendidikan inklusif pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon sudah dilaksanakan selama kurang lebih tiga tahun terakhir, namun masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi di sekolah antara lain pengetahuan guru mengenai pendidikan inklusi serta anak berkebutuhan khusus yang masih sangat minim serta budaya, kebijakan, dan praktek yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif itu sendiri. Selain itu belum pernah dilaksanakan evaluasi mengenai keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon berdasarkan index yang disebut index for inclusion. Menurut Ainscow (2002) secara konseptual indeks inklusi dibangun dari tiga dimensi yaitu “1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), 2) dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*), 3) dimensi Praktek (*evolving inclusive practices*)”. Berhubung luasnya masalah yang ada, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada dimensi praktik (*evolving inclusive practices*). Dimensi praktek yang akan di gali yaitu memiliki 16 indikator yang diadopsi dari Tony Booth dan Mel Ainscow , masing-masing indikator tersebut adalah: 1) pengajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan siswa, 2) Guru dan GPK saling berkomunikasi, 3) Sarana sekolah didistribusikan secara maksimal, 4) tenaga ahli bekerja secara maksimal, 5) seluruh guru berpartisipasi dalam

pembelajaran, 6) Masyarakat mendukung sumber pembelajaran, 7) semua murid aktif dalam pembelajaran, 8) pembelajaran mengandung arti penting perbedaan, 9) semua murid terlibat aktif dalam pembelajaran, 10) murid belajar secara kolaborasi, 11) peraturan kelas dibuat berdasarkan penghargaan terhadap perbedaan, 12) guru bekerjasama dengan GPK dalam proses pembelajaran, 13) semua siswa berperan diluar kelas, 14) keanekaragaman digunakan sebagai sumber mengajar dan pembelajaran, 15) penilaian dilakukan dalam memenuhi kebutuhan murid, 16) semua siswa diberikan peluang waktu yang cukup dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah.

2. Rumusan Masalah

Kegiatan pembelajaran di kelas merupakan inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru, yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.

Berdasarkan pemikiran tersebut serta identifikasi masalah maka pertanyaan utama penelitian ini adalah “Bagaimanakah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif pada 8 Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon?”.

Merujuk pada pertanyaan utama penelitian, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif di SMP Kota Ambon?

- b. Bagaimanakah keterlaksanaan perencanaan pembelajaran inklusif pada SMP di kota Ambon?
- c. Bagaimanakah keterlaksanaan pelaksanaan pembelajaran inklusif pada SMP di kota Ambon?
- d. Bagaimanakah keterlaksanaan evaluasi pembelajaran inklusif pada SMP di kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran inklusif pada 8 SMP di Kota Ambon. Secara khusus tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengetahuan guru mengenai pendidikan inklusif .
- b. Keterlaksanaan perencanaan pembelajaran inklusif pada SMP di Kota Ambon.
- c. Keterlaksanaan pembelajaran inklusif pada SMP di Kota Ambon.
- d. Keterlaksanaan evaluasi pembelajaran inklusif pada SMP di Kota Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi masukan dan sumbangan berupa kajian konseptual tentang unsur-unsur utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga turut memperkaya dan mempertajam pengembangan pendidikan inklusif di kota Ambon khususnya dan Indonesia umumnya.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan penyajian empiris tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota

Ambon. Secara praktis juga dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan inklusif bagi guru-guru pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB, pada BAB I memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian. BAB II memuat tentang kajian pustaka, . BAB III memuat tentang metode penelitian, lokasi dan populasi, pendekatan dan metode penelitian, variabel dan definisi operasional, validitas, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisa data. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan, BAB V memuat tentang kesimpulan dan saran.